



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI ANGKUTAN
UMUM BUS DAMRI (DJAWATAN ANGKOETAN MOTOR
REPUBLIK INDONESIA) BAGI MASYARAKAT DI
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



Oleh :

**DEWI SASMITA
NIM. 11575200958**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DEWI SASMITA
 NIM : 11575200958
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI
 ANGKUTAN UMUM BUS DAMRI (DJAWATAN
 ANGKOETAN MOTOR REPUBLIK INDONESIA) BAGI
 MASYARAKAT XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN
 KAMPAR

Disetujui Oleh

Pembimbing

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 712 074

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP: 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan,

Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si
 NIP: 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEWI SASMITA
 NIM : 11575200958
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI
 ANGKUTAN UMUM BUS DAMRI (DJAWATAN
 ANGKOETAN MOTOR REPUBLIK INDONESIA) BAGI
 MASYARAKAT XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN
 KAMPAR
 HARI/TANGGAL : JUM'AT/ 20-12-2019

**PANITIA PENGUJI
 KETUA PENGUJI**

DR.HJ SITI RAHMA,MSI
 NIP. 1964050508 199303 2 002

MENGETAHUI

PENGUJI I

IRDAYANTI,S.IP,MA

NIK. 130 411 030

PENGUJI II

MUAMMAR ALKADAFI, S. Sos,Msi

NIK. 130 712 075

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM BUS DAMRI (DJAWATAN ANGKOETAN MOTOR REPUBLIK INDONESIA) BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

DEWI SASMITA

NIM : 11575200958

Permasalahan pada penelitian ini yaitu belum maksimalnya kebijakan transportasi angkutan umum Bus Damri Kabupaten Kampar oleh Dinas Perhubungan kabupaten Kampar. Kurang berhasil memberikan pelayanan sebagai moda transportasi umum untuk masyarakat yang baik dalam sarana, prasarana, maupun pelayanannya serta banyaknya fasilitas yang tidak terawat dan banyak mengalami kerusakan dan belum adanya perbaikan yang dilakukan oleh pihak pengelola Bus Damri maupun pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan transportasi angkutan umum bus Damri di kecamatan XIII Koto Kampar dan mengetahui faktor-faktor penghambat kebijakan transportasi angkutan umum tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data diperoleh melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan data verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan transportasi angkutan umum Bus Damri bagi masyarakat XIII Koto Kampar menggunakan Peraturan Perundang-undangan No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang meliputi Indikator Keamanan, Keselamatan, Keteraturan, Kenyamanan, Keterjangkauan. Kebijakan transportasi angkutan umum Bus Damri bagi masyarakat XIII Koto Kampar dinilai Belum Maksimal. Karena dari 5 yang menjadi sub Indikator, 4 diantaranya belum sepenuhnya terlaksana.

Kata kunci: kebijakan, Damri (Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM BUS DAMRI (PEJAWATAN ANGKODERAN MOTOR REPUBLIK INDONESIA) BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR ”.

Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan berilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua Orang Tua, Ayahanda tercinta M. Saib (Alm) dan Ibunda Yurni yang telah merawat, membesarkan, dan membimbing dengan penuh pengorbanan, kerja keras dan jerih payah untuk dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan cita-cita penulis untuk dapat terus mengejar cita-cita hingga menjadi Sarjana Sosial. Sungguh mulia pengorbananmu ibu, dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, dan do'a serta dukungan untuk keberhasilan penulis hingga saat ini.

2. Untuk keluarga kakakku tersayang dan abangku tersayang Nur Hamidah, Nur Maini, Azrianto, Erman, Rosmita A.md, Musliadi S.sy, Desi Marlina S.pd dan adikku tersayang Selly Gustina yang membuat penulis terus semangat dan tersenyum. Dan seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan perhatian dan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muh. Said HM, M.Ag MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Ibuk Weni Puji Astuti, S.Sos M.Kp, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
7. Bapak Jhon Afrizal, S,Hi, Ma selaku Penasehat Akademis, terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Candra Jon Asmara S.Sos, M.Si, selaku dosen konsultasi proposal dan pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
9. Kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar beserta pegawai dan juga staf yang membantu dalam memberikan masukan dan juga kesempatan untuk meneliti di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai aspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
11. Untuk Sri Maryayanti, Desri Andriani, Dewi Ulfayanti, Ayu Murni Ariska, Wan Ezah, Puja Sentosa sebagai sahabat yang selalu memberikan semangat motivasi dan dorongan yang menenangkan hati dan pikiran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Untuk Ahmad Mustari yang selalu membantu penulis dan selalu memberikan semangat, masukan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
13. Kepada seluruh guru-guru dan teman-teman dimana saya menimba ilmu mulai dari SD, MTS, MA, khususnya SDN 012 Koto Tuo Barat, MTS Darussakinah Batu Bersurat, dan MA Hasanah Pekanbaru.
14. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 20 Desember 2019

DEWI SASMITA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Masalah.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Konsep Otonomi Daerah.....	13
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	14
2.3 Implementasi Kebijakan.....	16
2.4 Konsep Transportasi	22
2.5 Pengelolaan Transportasi	26
2.6 Konsep Peranan Pemerintah Dalam Bidang Transportasi	33
2.7 Konsep Damri	34
2.8 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan Transportasi.....	36
2.9 Penelitian Terdahulu	37
2.10 Defenisi Konsep.....	39
2.11 Konsep operasional.....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 44

- 3.1 Jenis Penelitian..... 44
- 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 44
- 3.3 Informan Penelitian..... 44
- 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... 45
- 3.5 Teknik Analisa Data..... 46

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 48

- 4.1 Gambaran Umum Wilaya Kabupaten Kampar 48
- 4.2 Tinjauan Histori 48
- 4.3 Kondisi Geografis 49
- 4.4 Penduduk 50
- 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar 51
- 4.6 Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 52
- 4.7 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar..... 53
- 4.8 Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 53

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 59

- 5.1 Implementasi Kebikan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri
Bagi Masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten
Kampar 59
- 5.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Transportasi Angkutan
Umum Bus damri Bagi Masyarakat di Kecamatan XIII Koto
Kampar Kabupaten Kampar 75

BAB VI : PENUTUP 78

- 6.1 Kesimpulan 78
- 6.2 Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar	5
Tabel 1.1 : Daftar jumlah bus dan penumpang yang berangkat di tahun 2017-2019 dan dari koto kampar ke terminal bangkinang.....	6
Tabel 1.2 :Jadwal Angkutan Perintis Terminal Bangkinang – Muara Takus	8
Tabel 4.1. :Konsep Operasional	41
Tabel 4.2 :Kerangka Pemikiran.....	42
Tabel 4.3 :Informan Penelitian.....	45
Tabel 4.4 :jumlah Penduduk menurut jenis Kelamin Di kabupaten Kampar.....	51

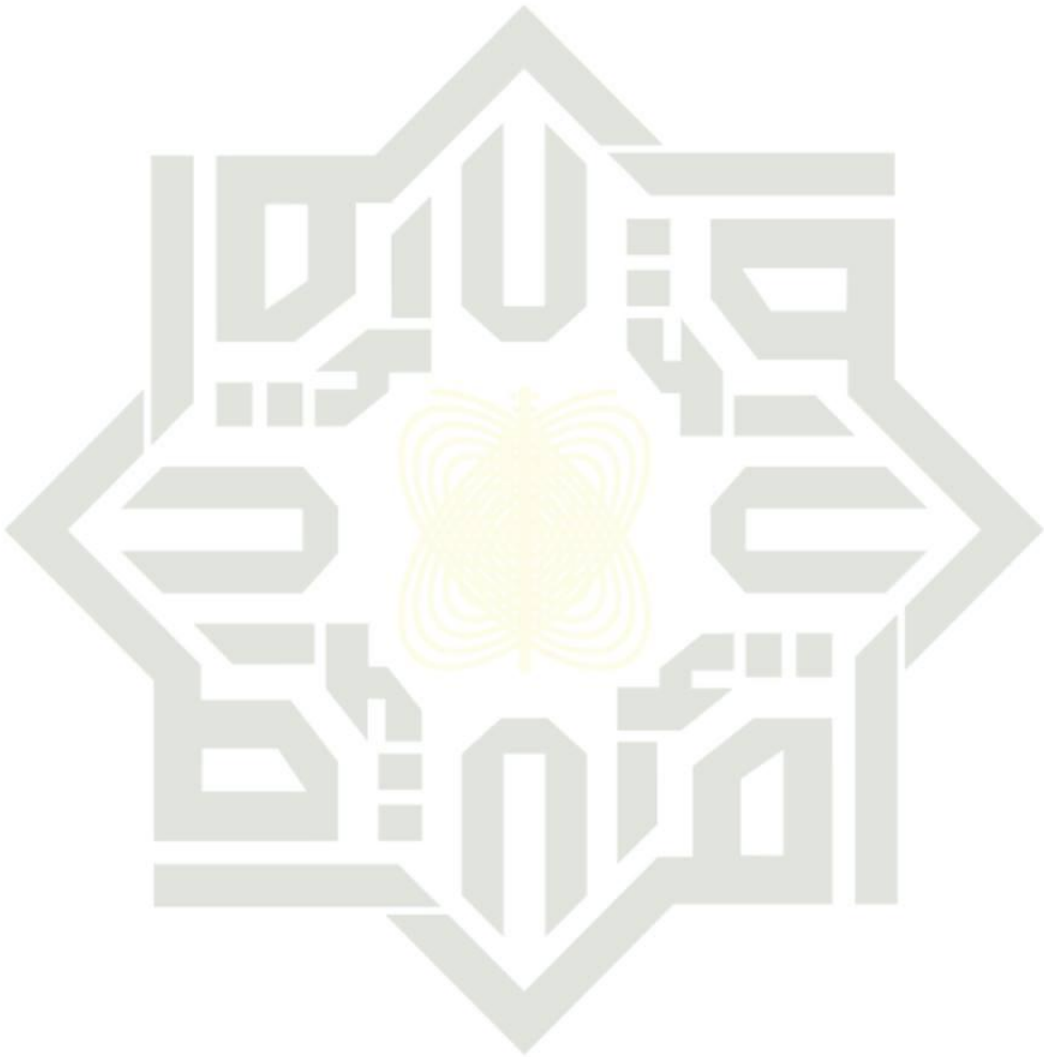
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	58



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangMu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta

memperkenalkanku dengan cinta. Atas karuniaMu serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad SAW pemimpin yang sempurna yang hingga akhir hayatnya begitu mencintai umatnya.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka dan duka, yang selalu mendampingi saat kulemah dan tak berdaya, yang menjadi kekuatan disetiap perjuanganku (ayah dan ibu tercinta) Bapak Saib (Alm) dan Ibunda Yurni yang selalu memanjatkan doa untuk ananda tercinta dalam setiap sujudnya dan dalam setiap titik peluh yang ia rasakan. Terimah kasih untuk semuanya.

Mungkin tak sebanding dengan perjuangan dan pengorbananmu untuk anakmu ini, tetapi semoga karya ini menjadi langkah kecil untuk memberi kebahagiaan lebih untuk ayah dan ibu. Aku mencintaimu (ayah dan ibu).

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-MOTTO-

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al Insyirah: 6)

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

Tidak ada satupun msibah (cobaan) yang menimpa seseorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya.”

(HR. Muslim)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara konstitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan dipertegas dengan Pasal 37 ayat (5) bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Asas-asas yang pada awalnya adalah asas sentralisasi dan konsentrasi, berkembang menjadi asas desentralisasi dan dekonsentrasi, dengan prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan erat dengan perubahan kebijaksanaan desentralisasi di Indonesia.

Undang-undang ini membawa pergeseran paradigma terhadap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada Pemerintahan Desa. Inilah konsekuensi dari sebuah tuntutan kebijakan dan paradigma baru yang harus dipilih. Undang-undang ini telah memberikan otonomi yang jauh lebih besar kepada daerah otonom yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Otonomi Daerah dianggap sebagai opsi yang tepat untuk meningkatkan



derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara proporsional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan aset ekonomi dan politik serta pengaturan sumber daya lokal (Affan Gaffar, 2006 : 72).

Terkait dengan hal di atas, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Negara pada hakikatnya sangat menghargai hak-hak asal usul suatu daerah yang telah otonomi sepenuhnya dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom adalah penyelenggaraan sistem transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi, baik darat, laut maupun udara, ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang.

Transportasi darat merupakan salah satu yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bahkan suatu Negara. Transportasi darat harus menciptakan suatu system yang menjamin pergerakan manusia, barang dan jasa, seperti memberikan pelayanan berkapasitas cukup, cepat, aman, nyaman, lancar dan efisien. Namun berbagai permasalahan disektor angkutan darat hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat ini masih bermunculan. Kemacetan dikota besar, jalan yang rusak halte yang tidak mendukung dan permasalahan yang lainnya masih menjadi berita yang didengar hamper setiap hari.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dibidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa transportasi darat seperti asas-asas dan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, asuransi, tarif angkutan dan juga diatur mengenai tanggung jawab pihak pengangkut. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 3 yang berbunyi: “ Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maupun memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.” Melihat dari isi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ secara detail menjelaskan:

1. Keamanan
2. keselamatan
3. keteraturan
4. kenyamanan
5. keterjangkauan

tetapi pada kenyataannya Bus Damri di Kabupaten Kampar masih memiliki kekurangan dalam memenuhi 5 indikator tersebut. Menciptakan pelayanan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkualitas kepada para penumpang adalah salah satu yang harus diperhatikan dalam pelayanan dibidang transportasi/angkutan umum. Pelayanan dibidang transportasi mengacu pada undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai landasan hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 213 ayat 2b yang berbunyi pemerintah membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan ngkutan Jalan yang ramah lingkungan, menjadi acuan dalam melihat sarana dan prasarana transportasi yang diberikan oleh Perum Damri kepada masyarakat.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau dan terkenal dengan sebutan Bumi Sarimadu. Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 10.928,20 kilometer persegi. Letak goeografisnya membentang antara 1° 00'40" garis lintang utara sampai 0° 27'00" lintang selatan dan 100° 28'30" bujur barat sampai 101° 14'30" bujur timur serta berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kampar memiliki wilayah yang luas, sehingga masyarakat membutuhkan sistem transportasi yang baik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sistem transportasi di Kabupaten Kampar dipegang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2008. Untuk mengetahui jumlah penduduk Kabupaten Kampar dapat dilihat pada table berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Data Jumlah Penduduk Kabupaten kampar

Tahun	Jumlah Penduduk
2015	683.764 Jiwa
2016	783.880 Jiwa
2017	885.672 Jiwa
2018	933.202 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar

Kabupaten kampar terkenal sebagai salah satu tujuan kota perdagangan dan pendidikan, maka dari itu banyak orang datang untuk bersekolah dan mencari pekerjaan di kabupaten kampar, sehingga kota ini semakin padat dan ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang di jalan, akibat dari keramaian ini lalu lintas di kabupaten kampar kota bangkinang mulai macet, dimana-mana kita akan menemukan banyaknya bangunan-bangunan yang besar menghiasi kota sehingga lahan semakin sedikit untuk keperluan sarana publik. Kondisi inilah yang membuat pemerintah harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di kabupaten kampar sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota.

Bus Damri merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan otobus yang beroperasi di Kabupaten Kampar yang melayani jasa transportasi bus kota rute bangkinang – XIII Koto Kampar yang memiliki persaingan dengan bus – bus lain seperti angkutan kotaminibus yang beroperasi di trayek rute yang sama maupun melewati rute yang searah.

Operasional bus DAMRI di Kabupaten Kampar telah dimulai sejak 24 Juli 2017, pengoperasian ini termasuk ke dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar pada bidang transportasi darat. Saat ini kondisi trayek bus DAMRI yang dikelola PERUM DAMRI Cabang Riau memiliki dua trayek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Trayek utama dari PERUM DAMRI Cabang Riau adalah trayek yang menghubungkan Terminal Kampar menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II dan trayek kedua merupakan tujuan pariwisata yang melayani penumpang menuju objek wisata Candi Muara Takus dari Terminal Kampar.

Beroperasinya Armada Bus Damri menandai kemajuan transportasi di Kabupaten Kampar pada era kepemimpinan Almarhum Bupati Kampar H Aziz Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto,SH. Bus Damri yang merupakan suatu unit usaha Badan Milik Negara (BUMN) ini melayani trayek Bangkinang ke Candi Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar yang mulai melayani penumpang pada 26 Oktober 2017 dengan ongkos gratis selama uji coba 1 minggu. Setelah melaksanakan uji coba selama satu minggu bus damri trayek bangkinang ke XIII Koto Kampar akan memungut biaya dengan tarif sekali jalan sebesar Rp. 10.000,- perorang untuk penumpang umum, dan untuk pelajar akan dikenakan tarif sebesar Rp. 5000,- perorang bagi yang mempunyai kartu pelajar. Bus yang akan beroperasi di XIII Koto Kampar sebanyak 2 bus, bus damri mempunyai kapasitas 18 tempat duduk dan dilengkapi dengan pendingin udara. Adapun jumlah bus dan penumpang yang berangkat dari terminal kabupaten kampar ke XIII koto kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.2
Daftar jumlah bus dan penumpang yang berangkat di tahun 2017-2019 dari xiii koto kampar ke terminal bangkinang

TAHUN	JENIS KENDRAAN	PERTAHUN	
		BUS (UNIT)	PENUMPANG (ORANG)
2017	Damri	2	525.353
2018	Damri		385.834
2019	Damri		125.384

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, 27 juni 2019

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa tingkat jumlah penumpang penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum Bus lebih banyak mengalami penurunan, 2017-2019 terjadi penurunan terbesar dari 525.353 penumpang hingga sampai menurun menjadi 125.384 penumpang. Terdapat permasalahan berdasarkan wawancara dengan informan bahwa akibat campur tangan dari adanya Bus swasta (suvar ven) yang bebas masuk. Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, pemerajaan akan dilakukan juga sudah memang sudah perlu dan ada dana, tetapi semenjak adanya campur tangan pihak swasta lainnya, lahan pencarian uang menjadi sempit sehingga pemerajaan pas bus minim dilakukan. Beberapa penurunan level kualitas pelayanan yang memicu penurunan jumlah penumpang pada perum damri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Penurunan Kualitas Pelayanan

No	Penurunan Kualitas Pelayanan
1	Fasilitas seperti AC dalam bus DAMRI mengalami kerusakan, serta keterlambatan waktu datang bus
2	Kurangnya kenyamanan yang diberikan kepada konsumen karena tempat duduk
3	Dari kurangnya berfungsi AC serta banyak kursi dan keterlambatan waktu bus

Sumber: Perum Damri Kabupaten Kampar 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 pada pasal 213 telah terdapat indikator dalam hal membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan yang ramah lingkungan namun pada kenyataan masih belum berjalan dengan semestinya. Sistem prasarana transportasi mempunyai ciri utama yaitu melayani pengguna dimana dalam pemilihan dan pengguna alat (moda) transportasi perlu disiapkan tempat moda tersebut bergerak, seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara. Sedangkan sistem sarana transportasi lebih mengarah ke pemilihan jenis moda. Secara umum moda transportasi dibedakan menjadi dua, yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum penumpang atau angkutan umum.

Menurut Nasir S.E,MM selaku kepala UPTD Pengelolaan Damri Kampar bus dijadwalkan 2 kali keberangkatan, baik dari terminal bangkinang maupun ke candi muara takus. Jarak terminal ke candi muara takus lebih kurang dari 57 kilometer.

Tabel: 1.4
Jadwal Angkutan Perintis Terminal Bangkinang – Muara Takus

NO	DARI TERMINAL BANGKINANG	PERKIRAAN TIBA DIMUARA TAKUS	KETERANGAN
1	08.30 WIB	10.30 WIB	
2	11.30 WIB	13.30 WIB	WAKTU SHALAT DZUHUR
3	15.00 WIB	17.00 WIB	WAKTU SHALAT ASHAR
NO	DARI MUARA TAKUS	PERKIRAAN TIBA TERMINAL BANGKINAG	KETERANGAN
1	07.00 WIB	09.00 WIB	
2	11.30 WIB	13.30 WIB	WAKTU SHALAT DZUHUR
3	15.00 WIB	17.00 WIB	WAKTU SHALAT ASHAR

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, 27 juni 2019.

Standar Operasi Bus Damri kabupaten Kampar

1. Bus beroperasi tiap hari pukul:
07.00 – 17 -30 Wib
2. Jumlah penumpang maksimal:
Duduk 18 dan berdiri 10 = 28 orang
3. Kecepatan bus :
30 – 50 dalam kota
4. Waktu tunggu:
10-15 menit
5. Bus berhenti tiap halte :
45-60 detik
6. Ketepatan waktu kedatangan:
10-15 menit
7. Ac dalam Bus
25-270C
8. AUDIO Syistem
Maksimal level 4 atau 10 level
9. Tarif penumpang:
Rp. 10.000,-Umum/Mahasiswa
Rp. 5.000,-Pelajar
10. Rute Bus Damri
Candi Muara Takus-Bangkinang
Bangkinang - Bandara SSQ Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bus Damri Kabupaten Kampar mempunyai 2 trayek, antara lain adalah sebagai berikut:

1. KORIDOR 1 : BANGKINANG-CANDI MUARA TAKUS

Jl. Raya Bangkinang Lintas Sumbar - XIII Koto Kampar

2. KORIDOR 2: BANGKINANG-BANDARA SUTAN SYARIF KASIM

RIAU

Jl. Raya Bangkinang, Pekanbaru, - Jl. HR. Subrantas-Jl. Sukarno Hatta-Jl.

Arifin ahmad – Jl. Jend. Sudirman

Jadi kurang efisiennya Bus Damri Kabupaten Kampar dari beberapa hal yaitu kurang berhasil memberikan pelayanan sebagai moda transportasi umum untuk masyarakat yang baik dalam sarana, prasarana, maupun pelayanannya.

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan diatas maka penulis ingin mengetahui efektivitas pengelolaan pada Bus Damri dan bagaimana peran pemerintah terhadap pengoperasian Bus Damri. Berdasarkan dari masalah diatas, maka peneliti mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri (Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia) Bagi Masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dapat muncul karena adanya keraguan tentang keadaan sesuatu, sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan efektif. Bertitik tolak dari latar belakang dan persoalan yang ditemui, maka rumusan masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri Bagi Masyarakat Di Kecamatan XIII Koto Kampar!
2. Apa Saja Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri Di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesimpangsiuran. Adapun tujuan penelitian yaitu

1. Mengetahui Implementasi Kebijakan Bus Damri Bagi Masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
2. Untuk Mengetahui Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah.

2. Sebagai informasi bagi yang membutuhkan tentang bagaimana Implementasi kebijakan Bus Damri Bagi Masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”

Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis serta lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis merasa perlu mengklasifikasikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam BAB II ini mengemukakan teori yang melandasi pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian, yang terdiri dari: landasan teori, konsep operasional dan kerangka pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam BAB III ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan mengenai Gambaran Umum Daerah Penelitian, Kondisi Geografis, Jumlah Penduduk, Agama, Mata Pencarian, Pembangunan serta Organisasi dan Tata Laksana.

BAB V : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pembahasan dan Hasil Penelitian yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian skripsi ini. Dimana akan diberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan serta mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan sumbangan pemikiran.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Otonomi Daerah

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah mendefenisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan daerah otonom disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Masud Said (2008:6) dalam Almasri dan Alkhadafi (2018:65) otonomi daerah dipahami sebagai sebuah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia, otonomi daerah diartikan sebagai proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Sangkan Surmaryadi (2005:48) mengatakan otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya

sebagai manifestasi dari desentralisasi. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan perundang-undangan. Pemerintah daerah dengan otonom adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke desentralisasi. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan, sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah maka akan dilaksanakan melalui asas pembantuan.

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi daerah ini tidak terjadi pada organisasi/administrative lembaga pemerintah daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (publik).

2.2 Konsep Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan pemusatan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pihak yang

berwenang untuk mengatur kehidupan bernegara yang menjadikan pedoman guna menyelesaikan masalah yang terjadi dan mencegah timbulnya masalah publik.

Menurut Shore dan Wright dalam (Marzali 2012:20) Kebijakan adalah instrumen teknis dan rasional untuk menyelesaikan masalah. Titmuss mengatakan dalam (Suharto 2012:7) Kebijakan adalah sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Selanjutnya Menurut Thomas R. Dye dalam (Winarno 2008:17) Kebijakan adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah tahap-tahap yang penting sangat diperlukan dalam upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai keputusan. Tahap-tahap dalam kebijakan (Sugandi, 2011:82) tersebut yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlumenyusun agenda dan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Pada tahap ini masalah dimasukkan kedalam agenda untuk dipilih. Terdapat masalah yang ditetapkan sebagai focus pembahasan masalah mungkin ditunda pembahasannya atau tidak disentuh sama sekali. Masing-masing masalah yang dimasukan atau tidak dimasukkan dalam agenda memiliki argumentasi masing-masing. Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap penysunan agenda harus secara jeli meliahat masalah-masalah mana saja yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan masalah kebijakan sehingga pemilihan dapat menemukan masalah kebijakan yang tepat.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah dimasukan dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi. Dari berbagai masalah yang ada tersebut ditentukan masalah yang mana yang merupakan masalah yang benar-benar layak dijadikan focus pembahasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Implementasi Kebijakan

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2012), mendefinisikan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai actor, khususnya birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program bderjalan.

Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Lebih jelasnya Merilee S. Grindle dalam (Sibarsono 2013), mendefinisikan bahwa pandangannya tentang implementasi secara umum tugas implementasi adalah membuat suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa terealisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery

system”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Wahab (2014:203-211), bahwa tahapan-tahapan implementasi ditinjau dari:

1. Keluaran Kebijakan (keputusan)

Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa.

2. Kepatuhan Kelompok Sasaran

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dan para pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Dampak Nyata Kebijakan

Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan Undang-undang. Kelompok sasaran benar-benar patuh,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebab-akibat) yang tinggi.

4. Persepsi Terhadap Dampak

Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut.

Lebih jauh menurut mereka implementasi mencakup banyak macam kegiatan yaitu:

1. Badan-badan pelaksanaan yang ditugasi oleh Undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapat sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, bahan tanah, bahan-bahan mentah dan uang.
2. Badan badan pelaksanaan mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.
3. Badan-badan pelaksanaan harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Maksudnya adalah badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan yang bisa di pandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Van meter dan Horn dalam Winarno, (2008:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Maksudnya adalah tahap implementasi kebijakan tidak akan di mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang di tetapkan dan dana di sediakan untuk membiayai pelaksanaan program tersebut.

Dalam keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

George C. Edward III (Winarno 2008:175-203) mengenai pandangan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber daya (Resources) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan secara efektif.

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari pada implementator kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimalnya tiga hal, yaitu: Adanya tujuan dan sasaran kebijakan, Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan Adanya hasil kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah sehingga ada akhirnya akan mendapat suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.3.1 Pelaksanaan Kebijakan

Pemerintah dalam membuat peraturan yang mengatur tentang transportasi umum mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Suatu kebijakan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik. Setiap kebijakan yang dibuat memiliki tujuan yang dicapai oleh pembuat kebijakan, yaitu pemerintah. Undang-undang No 22 Tahun 2009 pasal 213 menjelaskan bahwa pemerintah membangun dan

mengembangkan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan.

2.4 Konsep Transportasi

2.4.1 Pengertian Transportasi

Dengan diundangkannya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan wilayahnya. Dalam pembangunan ini dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, setiap organisasi yang dibentuk di setiap daerah baik resmi maupun tidak resmi harus memanfaatkan sumber daya yang terdapat di daerah tersebut untuk mencapai tujuan internal maupun eksternal organisasi.

Transportasi berasal dari kata latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi seperti itu merupakan suatu jasa yang diberikan guna menolong barang atau orang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Kegiatan transportasi mencakup bidang yang luas. Hampir seluruh kegiatan manusia tidak dilepaskan dari kebutuhan akan transportasi. Transportasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tingkat kehidupan manusia. Tanpa adanya jasa transportasi sebagai penunjang sulit tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha perkembangan ekonomi suatu Negara. Kehidupan masyarakat yang maju ditandai

oleh mobilitas yang tinggi, yang ditandai oleh tersedianya fasilitas yang cukup serta memadai dan murah.

Transportasi yang diselenggarakan harus dikelola secara efektif dan efisien agar kegiatan transportasi tersebut dapat memberikan pelayanan yang memuaskan, lancar, aman dan nyaman, oleh karena itu harus dilakukan perencanaan secara optimal.

Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ pasal 3 berbunyi “Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, cepat, lancar, tertip dan teratur, nyaman dan efisien, maupun memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau semua plosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. “ melihat dari isi Undang-undang No.14 Tahun 1992 tentang LLAJ secara detail menjelaskan tentang:

1. Keamanan

Penyediaan alat-alat keselamatan lalu lintas yang cukup (meliputi rambu-rambu lalu lintas) merupakan usaha untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merugikan penumpang dan barang yang diangkat serta manusia dan benda lainnya. Kerusakan pada harta kekayaan dan barang lain-lainnya merupakan kerugian materi. Kerusakan fisik dapat dicegah dengan melakukan pembongkaran dan pemuatan secara hati-hati. Kerusakan alamiah dapat dihindari dengan melengkapi alat-alat pendinginan, pemanasan, dan ventilasi. Barang-barang tersebut harus dilindungi terhadap pencurian, penyerobotan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebakaran. Untuk angkutan penumpang perlengkapan dan alat keselamatan harus disediakan dan diberi sanksi tegas terhadap pemilik sarana angkutan yang tidak memilikinya (Rahardjo Adisasmita 50:2010).

2. Keselamatan

Menjamin keselamatan pada saat di halte maupun bus, dan menyediakan alat penyelamat di dalam bus untuk keadaan darurat.

3. Keteraturan

Standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa. dan terdapat dua mutu pelayanan yang meliputi

- a. Indikator, dan
- b. Nilai, ukuran atau jumlah.

4. Kenyamanan

Barang mati tidak mengalami penurunan kualitas, barang hidup (hewan dan tumbuhan) tidak tersiksa dan mengalami penurunan kualitas. Sedangkan manusia perlu merasa nyaman sejak persiapan, maupun selama perjalanan, maupun sesudah menempuh perjalanan.

5. Keterjangkauan

Merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses Angkutan Massal Berbasis Jalan dan tarif yang terjangkau.

Menurut Setijowarno dan Frazila (2001) transportasi berarti suatu kegiatan untuk memindahkan sesuatu (orang dan atau barang) dari suatu tempat .ketempat yang lain, baik dengan atau tanpa sarana (kendaraan, pipa, dan lain-lain). Sedangkan menurut salim (2006), Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain. Jadi bila dikatakan kalau transportasi merupakan usaha mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ketempat lainnya.

Adapun unsur yang membentuk makna transportasi ialah:

1. Manusia yang membutuhkan
2. Barang yang dibutuhkan
3. Kendaraan sebagai alat/ sarana
4. Jalanan terminal sebagai prasarana transportasi
5. Organisasi (pengelolaan transportasi)

Kelima unsur ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang harus dipertimbangkan dalam menelaah masalah transportasi. Dalam hubungan ini perbaikan atau peningkatan transportasi terjadi bila terjadi perlakuan dan perbaikan pada masalah satu atau lebih unsur-unsur tersebut.

2.4.2 Klasifikasi Transportasi

1. Transportasi Darat

Transportasi darat terdiri atas dua yaitu:

a. Transportasi jalan raya

Dalam transportasi jalan raya ini meliputi transportasi yang menggunakan alat angkutan yang berupa manusia, sepeda motor, becak, bus, truk dan kendaraan bermotor lainnya.

b. Transportasi jalan rel

Didalam transportasi jalan rel ini digunakan alat angkutan berupa kereta api, yang terdiri atas lokomotif, gerbong, tangki, boks khusus, trailer dan kereta penumpang. Jalan yang digunakan berupa rel baja, baik dua rel maupun mono rel.

2.5 Pengelolaan Transportasi

Menurut Andi Mappi Sammeng (2001: 261) ada tiga factor penting dalam melakukan pengelolaan transportasi yaitu pengembangan, pengaturan, dan kelembagaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.51 Pengembangan

Untuk melakukan pengembangan transportasi hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Perencanaan

Perencanaan transportasi merupakan pengorganisasian secara menyeluruh pengembangan atau pembangunan fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana transportasi.

Salah satu cara untuk mewujudkan pengembangan yang berkesinambungan adalah melalui pendekatan perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi bertujuan mengembangkan system transportasi yang memungkinkan pergerakan manusia, barang dan sarana transportasi berpindah dari suatu tempat asal ketempat tujuan dengan lancar, aman atau selamat, murah dan nyaman serta terselenggara secara efektif dan efisien.(Adisasmita, 2011: 74).

Dalam peningkatan perencanaan transportasi dilakukan beberapa cara, sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan yang efektif (effective leadership),
- b. Kompetensi dan kemampuan anggota (staff competence and credibility),
- c. Kualitas keterlibatan public
- d. Pengembangan etos daerah
- e. Proses penyusutan dan tepat guna
- f. Hubungan kerja sama
- g. Koordinasi penggunaan lahan
- h. Akuntabilitas kepada anggota

System transportasi nasional (SISTRANAS) dalam pengembangannya berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2005 tentang visi SISTRANAS adalah terwujudnya kuantitas dan kualitas penyediaan fasilitas transportasi serta layanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, sedangkan misi SISTRANAS adalah:

- a. Menyediakan prasarana dan sarana transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi serta memenuhi standar minimal dan internasional.
- b. Meningkatkan daya saing industry jasa transportasi sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
- c. Memberdayakan masyarakat dunia usaha dan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan peran transportasi dalam mempercepat laju pertumbuhan pembangunan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan suatu rencana melibatkan semua pihak (pemerintah dan swasta). Adapun unsure-unsur pokok pelaksanaan suatu rencana pengembangan transportasi meliputi: pengesahan rencana terdiri dari sasaran, tujuan, kebijakan umum, dan pentahapan program (pengembangan) terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, koordinasi dan kerja sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pembiayaan pengadaan, pemeliharaan dan pengoperasian peralatan transportasi dilakukan oleh perusahaan angkutan tersebut. Biaya pengembangan transportasi suatu Negara/Daerah dapat dikelompokkan kedalam empat golongan besar yaitu biaya persiapan (pemerintah, swasta, kerjasama), pembangunan prasarana (terminal, halte, jalan), pengadaan sarana (fasilitas penunjang/alat transportasi), biaya pemantauan.

4. Pengendalian

Pengembangan pelaksanaan program khususnya program kerja atau target tahunan harus dipantau secara berkesinambungan. Pengendalian berupa pelayanan dan tanggung jawab tenaga kerja, kegiatan, pelaksanaan pengawasan proyek yang dilaksanakan, prasarana (terminal, halte, jalan) serta pengendalian pemasaran, jumlah penumpang perbulan, tingkat kepuasan masyarakat dan efektivitas kegiatan promosi yang dilakukan.

Tabel 2.1
Kebijakan Sebagai Pedoman Perumusan Strategi dan Upaya Pengembangan Transportasi

Kebijakan SISTRANAS	
1. Meningkatkan pelayanan transportasi nasional	
a. Meningkatkan kualitas pelayanan	
b. Meningkatkan keterpaduan pengembangan tataran transportasi nasional, tataran transportasi wilayah dan tataran transportasi local.	
c. Peningkatan peranan sector transportasi terhadap pengembangan dan peningkatan daya saing dan sector lain.	
d. Peningkatan dan pengembangan sector transportasi sebagai urat nadi penyelenggaraan system logistic nasional.	
e. Penyeimbangan peranan BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi	
f. Perawatan prasarana transportasi	
g. Optimalisasi penggunaan fasilitas yang ada	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Keterpaduan antar moda
- i. Pengembangan kapasitas transportasi
- j. Peningkatan pelayanan pada daerah tertinggal
- k. Peningkatan pelayanan untuk kelompok masyarakat tertentu
- l. Meningkatkan pelayanan pada keadaan darurat

2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi

- a. Peningkatan keselamatan transportasi
- b. Peningkatan keamanan transportasi

3. Meningkatkan pembinaan pengusaha transportasi

- a. Peningkatan efisiensi dan daya saing
- b. Penyederhanaan perizinan dan deregulasi
- c. Peningkatan kompetisi moda transportasi
- d. Peningkatan standarisasi pelayanan dan teknologi
- e. Peningkatan penerimaan dan pengurangan subsidi
- f. Peningkatan aksesibilitas perusahaan nasional transportasi keluar negeri
- g. Peningkatan produktivitas dan efisiensi perusahaan jasa transportasi
- h. Pembinaan BUMN

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan dan teknologi

- a. Peningkatan inovasi melalui penelitian dan pengembangan
- b. Pengembangan pendidikan dan pelatihan transportasi
- c. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan transportasi

5. Meningkatkan pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan penggunaan energy

- a. Peningkatan proteksi kualitas lingkungan
- b. Peningkatan kesadaran terhadap ancaman tumpahan minyak
- c. Peningkatan konservasi energy
- d. Penghematan pengguna ruang

6. Meningkatkan penyediaan dana pembangunan transportasi

- a. Peningkatan penerimaan dari pemakai jasa transportasi
- b. Peningkatan anggaran pembangunan nasional dan daerah Peningkatan partisipasi swasta dan koperasi
- c. Pemanfaatan hibah/bantuan luar negeri untuk program-program tertentu

7. Meningkatkan kualitas administrasi Negara disektor transportasi

- a. Penerapan manajemen modern
- b. Pengembangan data dan perencanaan transportasi
- c. Peningkatan struktur organisasi
- d. Peningkatan sumber daya manusia
- e. Peningkatan system pemotivasian
- f. Peningkatan system pengawasan

2.52 Kelembagaan

Aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi meliputi struktur, koordinasi, pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan serta peraturan. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa “Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan , sedangkan pemerintah melaksanakan pembinaannya.”

Pengaturan merupakan salah satu kegiatan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum suatu lembaga dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan perasaan nyama dan tenang. Dalam system kelembagaan transportasi hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Koordinasi

Koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Rencana pembangunan, yaitu (a) selalu terhubung dengan masa depan, (b) didasarkan pada beberapa tujuan dan (c) memerlukan koordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Koordinasi harus menghindari adanya inkonsistensi dalam penencanaan (Adisasmita, 2001: 42). Adapun unsure-unsur koordinasi menurut Syafie (dalam Monicca, 2013:5), meliputi:

- a. Pengaturan
- b. Sinkronisasi
- c. Kepentingan bersama

d. Tujuan bersama

2. Pendidikan

Pendidikan transportasi adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.

3. Pelatihan

Dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi diperlukan pelatihan transportasi yang terencana, terarah dan terpadu serta memenuhi standar nasional dan internasional agar tercipta keberhasilan sector transportasi.

Palatihan transportasi adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap prilaku sumberdaya manusia (SDM) yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.

2.5.3 Pengaturan

Menurut Ruray (2012: 104) pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan pendekatan hukum administrative. Pendekatan hukum lingkungan administrative ini akan memberikan focus instrument-instrumen kebijakan yang diterapkan, meliputi penerapan “instrument teknologi” untuk memilih teknologi dalam mengurangi dampak lingkungan, “instrument ekonomi” berupa kebijakan tariff untuk membuat masyarakat sadar akan ongkos yang harus ditanggung, dan “instrument perencanaan” transportasi dalam pengembangan wilayah yang mengarahkan pada pengurangan ketergantungan pada mobil pribadi.

2.6 Konsep Peranan Pemerintah Dlam Bidang Transportasi

Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomyang lain sebagai eksekutif dearah dalam penyelenggaraannyadilakukan bersama-sama DPRD. Dalam pasal 18 UUD 1945 mengatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar dan permusyawaratan dalam system pemerintah Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Puspito (1989:21) mengungkapkan pengertian peranan merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tujuan) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang. Jadi, peranan merupakan suatu konsep yang berisikan arah yang akan ditinjau seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan.

Dalam kebijakan transportasi secra nasional, pemerintah merumuskan berbagai strategi dan upaya yang diharapkan utamanya kepada: (1) meni ngkatnya kualitas pelayanan transportasi, (2) meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi, (3) meningkatnya pembinaan perusahaan transportasi, (4) meningkatnya kualitas sumber daya mnausia, serta ilmu pengetahuan teknologi, (5) meningkatnya pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan penggunaan energy, (6) meningkatnya penyediaan dana pembangunan transportasi, (7) meningkatnya kualiatas administrasi Negara disektor transportasi (Adisasmita, 2011:37).

2.7 Konsep Damri

2.7.1 Pengertian Damri (Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia)

Perum Damri adalah perusahaan umum yang berbadan hukum dengan tugas utama menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang diatas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Damri adalah singkatan dari Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia (ER, EYD: Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia) yang dibentuk berdasarkan maklumat Kementrian Perhubungan RI Nomor. 01/DAMRI/46 tanggal 25 november 1946 dengan tugas utama menyelenggarakan kendaraan bermotor. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai PERUM, nama Damri tetap diabadikan sebagai *brand mark* dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hingga saat ini masih tetap konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa angkutan penumpang barang dengan menggunakan bus dan truk. Hingga saat ini Damri masih memiliki jaringan pelayanan tersebar hamper seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam kegiatan usahanya Damri menyelenggarakan pelayanan angkutan kota, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota antar provinsi, antaran khusus Bandar udara, angkutan pariwisata, angkutan logistic, angkutan keperintisan dan angkutan lintas batas negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 pasal 6 tentang sifat, maksud dan tujuan Perum Damri, maksud dan tujuan perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum penyelenggaraan jasa angkutan umum, penumpang dan barang diatas jalan dengan kendaraan bermotor yang bermutu tinngi dengan memperoleh keuntungan sesuai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan prinsip pengelolaan perusahaan. Selanjutnya dalam pasal 7 dijelaskan mengenai kegiatan dan pengembangan usaha yang dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Jasa angkutan penumpang untuk umum dan atau barang.
2. Angkutan perintis berdasarkan penugasan pemerintahan.
3. Usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

Berdasarkan SK Dirjen 68/2002, mengatur lama perjalanan ke dan dari tempat tujuan setiap hari rata-rata satu sampai satu setengah jam, maksimal dua sampai tiga jam. Kecepatan perjalanan (kilometer per jam), adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kilometer dari panjang trayek, satuan yang digunakan menit per kilometer.

2.7.2 Damri Kabupaten Kampar

Bus Damri Kabupaten Kampar merupakan angkutan yang paling banyak dipilih oleh masyarakat di Kabupaten Kampar sebagai transportasi untuk umum di dalam kota khususnya jurusan XIII Koto Kampar-bangkinang. Beberapa penyebab tersebut antara lain tarif angkutan yang murah, hemat pengeluaran dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi, mengurangi dari kemacetan lalu lintas, bebas dari polusi lingkungan, nyaman, dan waktu perjalanan yang lebih cepat. Menggunakan jasa transportasi kota merupakan salah satu solusi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di perkotaan tetapi tetap tidak bisa menghindar dari kemacetan lalu lintas di perkotaan karena masih sedikitnya kesadaran masyarakat menggunakan jasa transportasi umum dan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.8 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan Transportasi

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berbicara mengenai pengelolaan ini yaitu surat Al-Isra' ayat 26 yaitu sebagai berikut:

تَبَذِّرْ تَبَذِّرْ وَلَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَاوَاتِ

Artinya: " dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros ." (QS. Al-Israa:26)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh hambanya untuk selalu hidup dengan tidak berlebihan atau mengelola sesuatu dengan ketepatan sehingga tujuan/sasaran yang di inginkan dapat tercapai dengan maksimal dan efektif.

Sebagai seorang pembeli, seorang muslim harus mengikuti aturan Allah SWT misalnya dengan memberikan kemudahan-kemudahan yang bersifat kebijaksanaan dalam proses transaksi atau dengan tidak menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan hal yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.(QS. Al-Baqarah:267)

Dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan tidak dapat dilakukan semauanya saja, semua perilaku harus dipandu oleh Allah lewat Al-quran dan Hadis. Fasilitas dalam Islam dan konvensional juga tidak mengalami perbedaan yang signifikan, perbedaannya hanya terletak pada proses penggunaannya yang mana ketika pelaku bisnis memberikan pelayanan dalam bentuk fisik hendaknya tidak menonjolkan kemewahan. Islam menganjurkan setiap pelaku bisnis untuk bersikap profesional yakni dapat bekerja dengan cepat dan tepat sehingga tidak menyalahgunakan amanat yang menjadi tanggung jawabnya.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama adalah penelitian oleh Ibnu Wardana dengan judul “Integrated Transportation System Bus Damri Menggunakan PYQGIS, WEBGIS dan Android (studi kasus dinas perhubungan kabupaten Kampar)” permasalahan dalam penelitian

ini yaitu bagaimana merancang dan membangun system transportasi yang terintegrasi menggunakan PYQGS, WebGIS dan Android di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan tujuan penelitian ini adalah mengusulkan suatu system informasi transportasi berbasis Geografik information system (GIS) yang mengintegrasikan Perum Damri dan Dinas Perhubungan kabupaten Kampar untuk memudahkan penyampaian informasi masyarakat.

Perbedaan penelitian Ibnu Wardana dengan penelitian ini ialah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan menggunakan konsep operasional peraturan bupati kampar nomor 35 tahun 2008 tentang pengelolaan sistem transportasi di kabupaten kampar. Lokasi penelitian terletak di dinas perhubungan kabupaten kampar. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan konsep operasional Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian lokasi penelitian ini terletak di dinas perhubungan kabupaten kampar.

Kemudian yang kedua yaitu penelitian oleh Rizki Oktavianti dengan judul “Implementasi kebijakan transportasi umum di kota semarang (studi kasus perum damri)” permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Bus Damri di kota semarang serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan bus damri di kota semarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.10 Defenisi Konsep

Untuk memudahkan menganalisa serta membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis akan menjelaskan beberapa defenisi tentang penelitian ini, sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan, adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
3. Implementasi Kebijakan, implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi.
4. Pemerintah Daerah
Mendefenisikan pemerintah daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bus Damri
Sarana angkutan umum massal yang dikenal dengan Bus Damri Kampar ini, dikeluarkan oleh pemerintah kota pekanbaru guna mengatasi masalah kemacetan

serta sebagai pelayanan transportasi perkotaan. Pelaksanaan kebijakan ini berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.111 Tahun 2009 dimana kabupaten Kampar termasuk kota percontohan di bidang transportasi.

2.1 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga melalui pengukuran itu dapat mengetahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Adapun indikator-indikator dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan Kebijakan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu linta dan angkutan jalan	1. Penyelenggaraa n	1. Dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan / atau masyarakat
	2. Keamanan	1. Halte dan fasilitas pendukung halte 2. Bus dan fasillitas pendukung bus
	3. Keselamatan	1. Manusia 2. Bus 3. Prasarana
	4. Keteraturan	1. Waktu tunggu 2. Informasi pelayanan 3. Informasi waktu kedatangan mobil/bus 4. Informasi halte yang akan dilewati 5. Ketepatan dan kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan mobil/ bus
	5. Kenyamanan	1. Halte dan fasilitas pendukung halte 2. Bus dan fasilitas pendukung bus
	6. Keterjangkauan	1. Kemudahan perpindahan penumpang antar koridor

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Lapangan 2018

2.1.2 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiyono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: data olahan hasil penelitian tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menurut sugiyono (2005:1), adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa bagaimana Implementasi Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri Bagi Masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan Kecamatan XIII Koto Kampar . Alasan penulis memilih XIII Koto Kampar sebagai tempat penelitian adalah karena Kecamatan tersebut dimana masih banyak terdapat masyarakat berpenghasilan rendah dan yang sangat membutuhkan kendaraan umum seperti Bus Damri.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan data, informasi tentang situasi dan kondisi, latar belakang penelitian (Moloeng 2009 : 9), informan merupakan seorang yang benar mengetahui permasalahan yang

akan diteliti, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling. Adapun yang menjadi informan penelitian ini dan akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Unit	1
2	Kasubag tata usaha DISHUB Kabupaten Kampar	1
3	Karyawan	1
4	Masyarakat pengguna Bus Damri	10
	Jumlah	13

Sumber: Data Olahan Penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 2019

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pengamatan (*Observasi*) S.Margono (dalam buku Nurul Zuriah: 2009: 173) observasi diartikan “ sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dengan demikian peneliti dengan mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk melihat secara jelas bagaimana permasalahan yang ada dapat diteliti dengan benar.
- Wawancara(*interview*), yaitu teknik untuk mendapatkan data dan informasi dengan mengadakan tatap muka/tanya jawab langsung dengan sejumlah informan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dokumen/Arsip yaitu metode digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.

Menurut Sugiyono (2010: 329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini guna melengkapi data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun penelitian. Teknik analisis data terdapat beberapa komponen pokok, menurut Ulber Silalahi (2010:339) yaitu:

Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat focus, membagi hal yang tidak penting dalam mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat membuat kesimpulan akhir.

Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang

disajikan, kita ,melihat dan akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus cdilakukan lebih jauh tindakan-tindakan bderdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Menarik kesimpulan

Kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verivikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang terlintas didalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tujuan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu seksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”.

Singkatnya, makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekuatannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang kita miliki adalah ciri-ciri yang menarik mengenai suatu yang terjadi dan tidak jelas keberadaannya dan kegunaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Wilaya Kabupaten Kampar

Letak Kabupaten Kampar sangat strategis, karena disamping diapit oleh dua Kabupaten/Kota yaitu Pekanbaru dan Rokan Hulu. Kabupaten Kampar merupakan jalur lintas barat yang menghubungkan beberapa kota di Sumatra dan juga berada di kawasan segitiga pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Malaysia, Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailan (IMT-GT).

4.2 Tinjauan Historis

Secara husteris kabupaten Kampar berdiri pada tahun 1949 melalui surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949. Ibu kota kabupaten Kampar pada awalnya adalah Pekanbaru dengan wilayah pemerintahan daerah-daerah bekas kewedanaan pelalawan, pasir pengaraian, bangkinang dan pekanbaru luar kota. Kemudian berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota kabupaten Kampar dipindahkan kebangkinang dan baru terlaksanan tanggal 6 juni 1967.

Pemindahan ibu kota kabupaten kebangkinang tersebut dilator belakangi antara lain oleh beberapa factor sebagai berikut.

Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Provinsi Riau

Pekanbaru selain menjadi ibu kota Provinsi Riau sudah menjadi Kota Madya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Mengingat luasnya daerah kabupaten Kampar sudah sewajarnya dipindahkan kebangkinang juga mengingat efisiensi pengurusan Pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4 Proyek masa depan kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru

5 Bangkinang terletak ditengah-tengah daerah kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan keseluruhan wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Kemudian sejalan diberlakukannya reformasi politik yang dilandasi oleh semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Kampar bersadarkan Undang-undang No 53 Tahun 1999 dimekarkan menjadi tiga wilayah pemerintahan, yaitu kabupaten Kampar, kabupaten rokan hulu, dan kabupaten pelalawan.

4.3 Kondisi Geografis

Kabupaten Kampar memiliki luas 10.983,46 km² yang wilayahnya berada di posisi 1

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu.

2 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.

3 Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat.

4 Sebelah Timur dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi wilayah Kabupaten Kampar terdiri dari daerah perbukitan dan beberapa sungai. Sebagian besar kabupaten Kampar merupakan daerah perbukitan yang berada disepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat dengan ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut. Disamping itu, sebagian besar wilayah ini dialiri oleh sungai- sungai besar yaitu sungai Kampar dan sungai Siak. Sungai Kampar yang panjangnya lebih 413.5 km dengan kedalaman rata-rata 7.7 meter dengan lebar rata-rata 147 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian sungai Siak bagian hulu panjangnya lebih kurang 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di kabupaten Kampar ini berfungsi antara lain sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang), prasarana perhubungan, dan sumber daya air bersih budi daya ikan. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis.

4.4 Penduduk

Secara administrasi pemerintahan, kabupaten Kampar terbagi kedalam 21 kecamatan yang terdiri dari kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Tambang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kuok, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hialir, Kecamatan Kiri Hulu, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Salo, Kecamatan Rimbo Jaya, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Gunung Sahilan, dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar

Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana diprioritaskan oleh pemerintah bahwa factor penduduk merupakan modal dasar dari pelaksanaan pembangunan.

Penduduk dalam wilayah Kabupaten Kampar pada tahun 2018 berjumlah 933.202 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Table 4.1 :
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dikabupaten Kampar

No.	Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bangkinang	20.920	20.222	41.142
2	Kampar	27.655	26.529	54.184
3	Tambang	41.494	38.562	80.056
4	XIII Koto Kampar	13.903	12.954	26.857
5	Bangkinang Barat	13.952	13.278	27.230
6	Siak Hulu	52.675	49.029	101.704
7	Kampar Kiri	18.787	17.076	35.863
8	Kampar Kiri Hilir	7.327	6.582	13.909
9	Kampar Kiri Hulu	6.699	6.266	12.965
10	Tapung	59.697	54.864	113.561
11	Tapung Hilir	36.859	33.666	70.525
12	Tapung Hulu	58.952	53.650	112.602
13	Salo	16.437	15.132	31.569
14	Rimbo Jaya	10.543	10.019	20.562
15	Bangkinang Seberang	19.005	17.910	36.915
16	Perhentian Raja	11.809	10.822	22.631
17	Kampar Timur	14.700	13.943	28.643
18	Kampar Utara	10.510	10.172	20.682
19	Kampar Kiri Tengah	17.135	15.414	32.549
20	Gunung Sahilan	13.230	12.227	25.457
21	Koto Kampar Hulu	12.239	11.357	23.596
Jumlah		484.528	448.674	933.202

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kampar menurut jenis kelamin yang laki-laki lebih banyak jumlahnya daripada jenis kelamin perempuan.

4.6 Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Pada masa orde baru kewenangan bidang perhubungan yang menyangkut bidang transportasi, jalan, angkutan orang dan barang, terminal dan parkir ada pada departemen perhubungan. Untuk daerah tingkat 1 propinsi riau Departemen perhubungan berbentuk kantor wilayah yang kewenangannya meliputi seluruh wilayah Daerah tingkat 1 propinsi riau. selanjutnya kantor wilayah (kanwil) Daerah Tingkat 1 propinsi riau membentuk kanwil pembantu pada masing-masing daerah tingkat II kabupaten.

Pada tahun 1993 Daerah tingkat II Kabupaten Kampar yang masuk dalam Daerah Tingkat 1 provinsi riau. dibentuk III kanwil pembantu dan melingkupi beberapa kecamatan yaitu antara lain:

1. Kanwil pembantu I yang berkedudukan di Bangkinang
2. Kanwil pembantu II yang berkedudukan di Pasir Pengaraian
3. Kanwil pembantu III yang berkedudukan di Pelalawan.

Setelah bergulirnya otonomi daerah kewenangan perhubungan diberikan kepada daerah tingkat II kabupaten. Untuk Kabupaten Kampar kanwil berubah menjadi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang pembentukannya berdasarkan peraturan daerah. Adapun aturan perubahan nama-nama Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Kabupaten Kampar.
- 2 Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kampar.
- 3 Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar.
- 4 Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar.
- 5 Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

4.7 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan mempunyai Fungsi.

- 1 Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan
- 2 Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan
- 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4 Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan
- 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.8 Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Berdasarkan pasal 3 peraturan bupati kampar nomor 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan kabupaten kampar adalah sebagai berikut:

1. Kepala dinas
2. Sekretaris terdiri dari:
 - a. Sub bagian perencanaan dan evaluasi
 - b. Sub bagian keuangan dan aset
 - c. Sub bagian kepegawaian dan umum
3. Bidang lalu lintas terdiri dari:
 - a. Sekasi manajemen dan rekayasa lalu lintas
 - b. Seksi analisis dampak lalu lintas
4. Bidang angkutan dan sarana terdiri dari:
 - a. Seksi angkutan
 - b. Seksi pengujian sarana
5. Bidang prasarana terdiri dari:
 - a. Seksi pembangunan prasarana
 - b. Seksi pengoperasian prasarana
6. Bidang pengembangan dan keselamatan terdiri dari:
 - a. Seksi pepaduan moda dan teknologi perhubungan
 - b. Seksi keselamatan dan lingkungan perhubungan
7. Kelompok jabatan fungsional
8. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.8.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Permasalahan yang terjadi, diidentifikasi karena masih kurangnya manajemen dibawah ini:

Kurangnya manajemen transportasi

Manajemen lalu lintas (transportasi) adalah serangkaian:

- a. Kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, operasional dan pengawasan
- b. Koordinasi antara infrastruktur, lalu lintas dan pengaturan
- c. Teknik manajemen lalu lintas
- d. Impact group/stake holder

Yang bertujuan untuk kelancaran lalu lintas, disamping tujuan tersebut juga di maksudkan agar efisien dan selamat atau yang lazim disebut dengan *Eficiency*, biaya pemakai (*User cost*).

Manajemen lalu lintas tersebut terbagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. Manajemen kapasitas, yaitu peningkatan kapasitas jalan dan kendaraan
- b. Manajemen prioritas, yaitu memprioritaskan kendaraan tertentu
- c. Manajemen permintaan, yaitu metode yang diharapkan agar pemakai jalan memberikan respon terhadap suatu kondisi tertentu yang timbul karena penerapan kebijaksanaan perbatasan lalin yang diberlakukan atau untuk membatasi permintaan.

Kurangnya manajemen aparatur

Instansi perhubungan adalah instansi teknis, maka dibutuhkan penyelesaian terhadap calon aparaturnya yang akan bekerja di instansi teknis ini. Karena tujuan utama dari transportasi itu adalah keselamatan (*safety*), dan ukuran dari keselamatan adalah cepat, selamat dan aman. Dengan beberapa kondisi pada waktu dan jalan yang antarlain: was-was, terlindungi, resiko/kecelakaan, bebas dan pejalan kaki atau sama dengan istilah *motorised trip* atau pejalan kaki.

4.8.2 Dentifikasi Permasalahan Bidang SI IT Transportasi

1. Belum terlaksananya sistem jaringan SI IT yang memadai
2. Belum terlaksananya tertip dan berlalu lintas dalam wilayah kabupaten kampar
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana SI IT di kabupaten kampar
4. Masih rancuhnya tugas dan kewenang dinas perhubungan kabupaten kampar dengan dinas perumahan dan pemukiman kabupaten kampar dalam hal penanganan penerangan jalan
5. Kurangnya aparaturnya yang memiliki keahlian di bidang SI IT Transportasi di kabupaten kampar.

4.8.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Pengembangan aglomerasi perkotaan

Pemerintah kabupaten kampar sedang mendorong upaya pembangunan sektor transportasi, yaitu:

- a. Ketersedian bus rapid transit
- b. Ketersediaannya angkutan perintis, pemuatan moda dan angkutan kapal SDP dan kepariwisataan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.8.4 ATCS dan PJU Smart Light Syistem

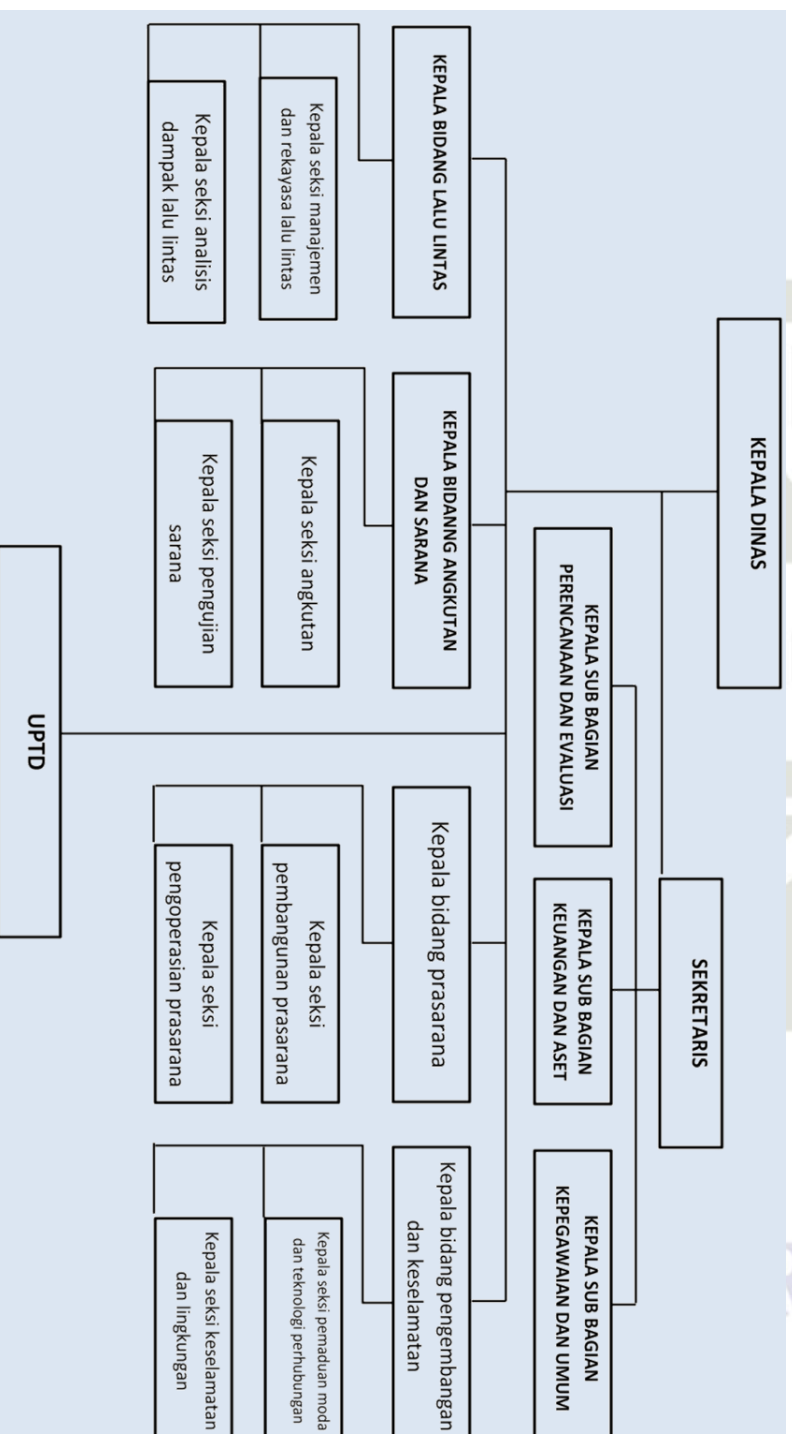
Kabupaten kampar khususnya kota bangkinang, sedang berbenah untuk ketersediaan area traffic control syistem dan penggunaan penerangan jalan umum berbasis IT dengan smart light.

Perlu penepatan CCTV di beberapa koridor jalan sehingga terkoneksi antar moda dan pengurusan transportasi lainnya.

4.8.5 Kampar Destinasi Wisata

Kabupaten kampar yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan Riau yaitu Candi Muara Takus, Ulu kasok, Gema dan lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri Bagi Masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Implementasi Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri Bagi Masyarakat Di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar diukur dengan menggunakan Indikator Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang terdiri dari 5 indikator yaitu: Keamanan, Keselamatan, Keteraturan, Kenyamanan dan Keterjangkauan dinilai BELUM OPTIMAL. Karena dari 5 indikator, 4 diantaranya belum terlaksanan sepenuhnya.

Berdasarkan hasil analisis dan temuan serta pembahasan bab-bab sebelumnya peneliti juga menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat Kebijakan Pengadaan Bus Damri Kampar adalah: a). Sumber Daya, b). Agen Pelaksana, c). Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksana

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Demi tercapainya pelaksanaan implementasi kebijakan angkutan umum bus Damri Bagi Masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar yang lebih baik lagi, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perusahaan Damri Kabupaten Kampar harus memberikan pelatihan agar tenaga kerja memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengoperasikan Damri. Sebagai pengelola harus dapat mengkoordinasikan sumber daya yang tersedia dan melakukan kerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah dalam pembangunan dan memajukan Damri sebagai angkutan umum yang lebih handal serta efektif dan efisien bagi masyarakat.
2. Pengelola harus mengenalkan Damri melalui segala media baik itu media elektronik, media masa ataupun internet serta melanjutkan kerja sama dengan pihak swasta ataupun pemerintah dalam mengadakan kegiatan-kegiatan dalam pengenalan Damri di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan XIII Koto Kampar.

Pemerintah harus lebih memperhatikan perkembangan Damri dengan memberikan bantuan dana dalam membangun dan memperbaiki serta memelihara sarana dan prasarana untuk kenyamanan penumpang karena berkembangnya Damri menjadi lebih maju akan meningkatkan pendapatan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, HA. 2006. *Manajemen Transportasi . PT. Ghalia Indonesia*: Jakarta
- Adi sasmita, Rahadjo dan Adji Adisasmita, Sakti. 20011. *Manajemen Transportasi Darat Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Besar (Jakarta)*, Penerbit Graha Ilmu, Makasar
- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Manajemen Pembangunan Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. 2008. Bandung : Alfabeta
- Amasri, Muammar Alkadafi. 2018. *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pekanbaru :Cahaya Firdaus
- Abdul, Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Edisi Revisi), Bumi Aksara, Jakarta.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Perenada Media Group
- Nasution Frazila. 2001. *Manajemen Transportasi. Pt. Ghalia Indonesia*: Jakarta
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I, Nyoman.2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama: Jakarta
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mardalis. (2010). *Metode penelitian (Suatu Pendekatan Proposal).*”Jakarta:Bumi Aksara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang Dan Peraturan

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1992
Perundangan Otonomi Daerah 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Perizinan Tertentu

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Seksi Pemaduan Moda
Dan Teknologi Perhubungan

Skripsi/Jurnal:

Abriasih Ulta.2017.Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bus
rapid transit (BRT) terhadap pendapatan perusahaan dalam perspektif
ekonomi islam.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam,
UIN RadenIntan Lampung.

Sanny Aswimbi. Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Sistem Angkutan
Umum Massal (SAUM) Trans Metro Pekanbaru

Winda Yunita Sari.2014. Analisis Pelaksanaan Pelayanan Transportasi pada
Angkutan Trans Metro Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPILAN I: DATA WAWANCARA

Implementasi kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri Bagi Masyarakat Di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

1. Kepala Bidang Angkutan Dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar
2. KASUSUBAG Bagian Kepegawaian Dan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar
3. Pengawas Terminal Bus Damri
4. Masyarakat Pengguna Bus Damri

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya dinas perhubungan kabupaten Kampar?
2. Bagaimana kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam memberikan pelayanan angkutan umum Bus Damri Pada masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar?
3. Penyelenggaraan
 - a. Bagaimanakah menurut bapak penyelenggaraan pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di daerah kab kampar . apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum?Kalau sudah terlaksana, apa saja contoh yang sudah terlaksana?kalau belum, apa kendala yang dihadapi sehingga belum terlaksana.
4. Pengembangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perencanaan

1. Bagaimana pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pihak Damri Kabupaten Kampar?
2. Apakah dengan adanya Damri telah meningkatkan kinerja ruas jalan sehingga mengurangi tingginya angka kecelakaan dan mengurangi kemacetan lalu lintas?

b. Pelaksanaan

1. Apakah kerja sama antara pihak pengelola dan pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan transportasi telah berjalan dengan baik?

c. Pembiayaan

1. Apakah dengan adanya Damri mengurangi biaya yang masyarakat keluarkan dalam melakukan perjalanan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat?
2. Bagaimana penanganan dalam pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana Damri di Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

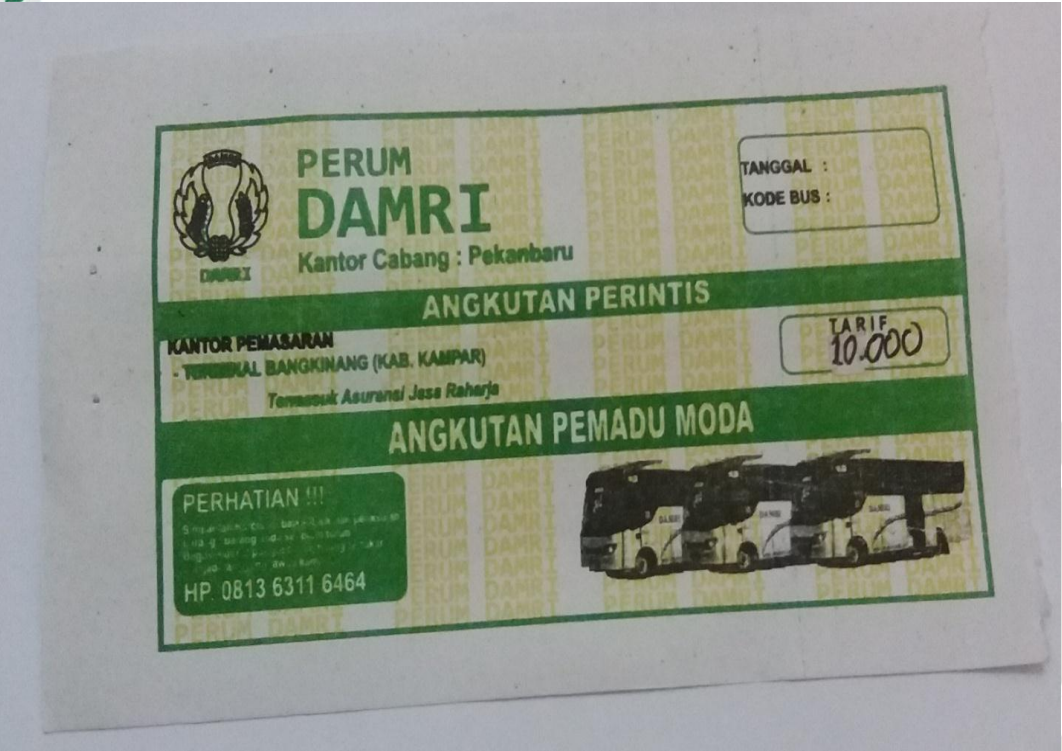


Suasana dalam bus

 PERUSAHAAN UMUM DAMRI (PERUM DAMRI) KANTOR CABANG PEKANBARU			
Jl. Sultan Ismail No. 147 KABUPATEN SIAK KODE POS : 28671		TELP. 0764 - 20158 FAX.	
		Web : Email : damripekanbaru@gmail.com	
Nomor : 45 /AP.209/IV/GM-2018 Klasifikasi : Penting Lampiran : 2 (dua) lembar Perihal : Berhenti Saat Masuk Waktu Shalat 5 (lima) waktu	Pekanbaru, 30 April 2018		
		Yth.	Kepada 1. Petugas Pengawas Angkutan 2. Pengemudi di- TEMPAT
<ol style="list-style-type: none"> Memperhatikan masukan, aspirasi pemuka agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kampar yang menggunakan pelayanan Perum DAMRI pada trayek keperintisan Terminal Bangkinang – XIII Kuto Kampar agar kiranya penumpang yang beragama Muslim, diberikan kesempatan untuk melaksanakan Shalat jika didalam perjalanan terdapat waktu yang bertepatan dengan masuknya waktu Shalat 5 (lima) waktu. Terkait dari point 1 (satu) diatas, diminta kepada Saudara agar dalam perjalanan : <ol style="list-style-type: none"> Berhenti sejenak (7 s.d 10 menit) untuk memberikan kesempatan bagi penumpang yang beragama Muslim untuk dapat menunaikan/menjalankan Shalat khususnya Shalat 5 (lima) waktu; Mencari Masjid terdekat yang mempunyai tempat parkir yang aman dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta mematikan mesin bus saat Shalat sedang berlangsung; Menyampaikan kepada penumpang yang beragama Non Muslim secara baik untuk dapat menunggu terkait pelaksanaan Shalat dimaksud. Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 			
<div style="text-align: right;">  D. SURIANTO BOKO GENERAL MANAGER </div>			
Tembusan Yth : <ol style="list-style-type: none"> Direksi Perum DAMRI di Jakarta; Bupati Kampar Cq Sekertaris Daerah Kab. Kampar di Bangkinang; Ketua DPRD Kabupaten Kampar di Bangkinang; Kepala BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri; Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Pekanbaru; Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar di Bangkinang; Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kampar di Bangkinang; Camat XIII Kuto Kampar; Kapolsek XIII Kuto Kampar; Dan Ramil XIII Kuto Kampar; Area Manager I Perum DAMRI di Jakarta. 			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tiket Bus Damri



Masana dalam bus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peneliti dengan kepala bidang angkutan dan sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, tanggal 26 juli 2019



Dokumen 2 wawancara dengan kepala bidang pengembangan dan keselamatan, tanggal 28 juli 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan karyawan dinas perhubungan, tanggal 18 juli 2019



Wawancara dengan kasubbag tata usaha perusahaan damri, tanggal 18 juli 2019

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Milindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3198/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 03 Mei 2019 M
27 Sya'ban 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Dewi Sasmita
NIM. : 11575200958
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri
Terhadap Angkutan Umum Bus Mini di Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198003 1 003

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: Un.04/F.VII/PP.00.9/3567/2019
: Biasa
: -
: **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 23 Mei 2019 M
18 Ramadhan 1440 H

Kepada

Yth. **Candra Jon Asmara, S. Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Dewi Sasmita
NIM : 11575200958
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri Terhadap Angkutan Umum Bus Mini di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198003 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22565
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VI/PP.00.9/3198/2019 Tanggal 3 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **DEWI SASMITA**
2. NIM / KTP : **11575200958**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM BUS DAMRI TERHADAP ANGKUTAN UMUM BUS MINI DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**
7. Lokasi Penelitian : **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Mei 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Pihak yang bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/378

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/22565 tanggal 8 Mei 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : DEWI SASMITA |
| 2. NIM | : 11575200958 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM BUS DAMRI TERHADAP ANGKUTAN UMUM BUS MINI DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : 1. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR
2. KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 10 Mei 2019

an. KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR

Kasi. Kesatuan Bangsa



ONNITA SETIAWAN

Penata Tk. I

NIP. 196610091988032003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Di Bangkinang
2. Sdr. Camat XIII Koto Kampar Di Batu Bersurat
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

BATU BERSURAT

Jalan Raya Candi Muara Takus

KODE POS 28453

REKOMENDASI

Nomor : 070/Kessos/2019/.....²³⁵

Camat XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, setelah membaca surat Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Kampar nomor : 070/KKBP/2019/378 tanggal 10 Mei 2019, dengan ini memberikan Rekomendasi/Izin Penelitian kepada :

Nama : **DEWI SASMITA**
NPM : 11575200958
Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau
Jurusan : Administrasi Negara
Jenjang : S1 (Strata 1)
Alamat : Pekanbaru
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM BUS DAMRI TERHADAP ANGKUTAN UMUM BUS MINI DI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

Lokasi Penelitian : 1. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR.
2. KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Batu Bersurat

Pada Tanggal : 13 Mei 2019

a.n. CAMAT XIII KOTO KAMPAR

Plt. Kasi Kessos

AHMAD ALIHANAFIA, S.Sos

NIP.1980010120100111011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, di Bangkinang
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, di Pekanbaru
3. Sdr. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PERHUBUNGAN

JL. TUANKU TAMBUSAI TELP.(0762) 323033 – 322153
BANGKINANG



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 071/DISHUB-PK-KL/40

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : **Drs. MAHADI, MH**
b. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : **DEWI SASMITA**
b. Nomor Mahasiswa : 11575200958
c. Program Studi / Universitas : Administrasi Negara / Universitas Islam Negeri Suska Riau
d. Judul Penelitian : Implementasi kebijakan transportasi angkutan umum Bus DAMRI terhadap angkutan umum bus mini di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Maksud : Kelompok Penelitian Mahasiswa tersebut di atas benar telah melaksanakan riset pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, sesuai dengan Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2019/378. tanggal 10 Mei 2019.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Bangkinang, 27 Juni 2019
KEPALA DINAS



Drs. MAHADI, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19661009 199112 1 001

RIWAYAT PENULIS



Dewi Sasmita lahir di Koto Tuo pada tanggal 07 Desember 1996. Anak Kedelapan dari Sembilan bersaudara, dari pasangan Bapak M. Saib (Alm) dan Ibu Yurni. Menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 012 Koto Tuo, Kecamatan XIII Koto Kampar dan tamat pada tahun 2009, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di MTS Darussakinah Batu Bersurat Kec. XIII Koto Kampar dan selesai pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MA Hasanah Pekanbaru dan selesai tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada jurusan Ilmu Administrasi Negara sejak tahun 2015 melalui jalur SNMPTN.

Selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 28 Februari 2018 penulis magang di Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar dibawah bimbingan Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si. Pada tanggal 15 Juli 2018 – 30 Agustus 2018 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Tapung Hilir Desa Kota Garo Koto Kabupaten Riau. Pada tanggal 27 Maret 2019 penulis melakukan seminar proposal penelitian. Dan Ujian Munaqasah pada tanggal 20 Desember 2019 penulis dinyatakan lulus ujian sarjana dibawah bimbingan Bapak Candara Jon Asmara S.Sos, M.Si dan di uji oleh Ibu DR.HJ. Sitti Rahma, M,SI , Ibu Irdyanti, SP,MA dan Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, Msi dengan hasil yang Baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.